

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk fenomena sosial, konflik tidak dapat terlepas dari interaksi yang terjadi antara aktor-aktor hubungan internasional. Konflik dapat terjadi terhadap antar individu, antar kelompok, hingga antar negara. Konflik dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu Kekerasan Langsung terhadap korban ditandai dengan efek secara langsung terhadap korban seperti korban terbunuh, terluka, serta kerusakan materi, Kekerasan Budaya seperti kekerasan terhadap suatu kelompok budaya secara spesifik, dan Kekerasan Struktural di mana kekerasan dilakukan oleh suatu aktor yang terorganisir.¹

Konflik yang diklasifikasikan oleh Galtung (1969) persis seperti apa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo sejak Perang Kongo I tahun 1996 hingga tahun 1997.² Konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo tergolong perang besar yang memakan ribuan korban. Perang Kongo I sebagai bentuk penentangan dari *the Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo-Zaire (AFDL)* atas sistem politik kediktatoran Presiden Mobutu Sese Seko yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila.³ Kabila dan pasukannya mendapatkan dukungan dari Rwanda dan Uganda untuk merebut ibu kota Kinshasa.⁴ Setelah berhasil menurunkan Presiden Mobutu dari posisinya, Kabila mengambil alih kekuasaan sebagai presiden RD Kongo dan mengubah nama negara dari Republik Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo.⁵ Akan tetapi perselisihan tidak berhenti sampai disana. Hubungan antara Presiden Laurent Kabila dengan Pemerintah Rwanda semakin memburuk sehingga kembali menyebabkan pecahnya pemberontakan yang

¹ Khaswara F & Hambali Y Ahmad. Teori Konflik Menurut Johan Galtung. Gunung Djati Conference Series, Vol 4, 2021. Hal.654

²Ingabire, L. & Kurniawan, Y. *The Challenges of UN Peacekeeping Mission in Finding a Solution to Rebel Groups in the East of the Democratic Republic of Congo*. Politica, Vol. 12, No.1, 2022. Hal.86

³Ibid

⁴<https://monusco.unmissions.org/en/background>. diakses pada 19 November 2023

⁵Hemming Tamm. (2022). ' *In the balance : external troop support and rebel fragmentation in the Second Congo War* '. Journal of Strategic Studies , vol. 45 , no. 4, Hal.9

disebut sebagai Perang Kongo II atau *The First African World War* pada tahun 1998 karena melibatkan beberapa negara kawasan Afrika lainnya seperti Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe yang memberikan bantuan pada Presiden Laurent Kabila dan bertentangan dengan kelompok pemberontak di Kongo. Pemberontakan pada Perang Kongo II telah menimbulkan dampak cukup besar terhadap perkembangan Republik Demokratik Kongo seperti menghambat perkembangan tatanan sosial, politik, hingga ekonomi negara tersebut.⁶ Diskriminasi, Kejahatan, hingga kekerasan terhadap dan tentara anak merupakan salah satu kasus konkrit yang disebabkan oleh perang besar di Republik Demokratik Kongo.

Perang Kongo I dan Perang Kongo II telah ditangani oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dengan menyerukan gencatan senjata, penarikan pasukan pemberontak, serta meminta aktor - aktor negara lain untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Republik Demokratik Kongo. Sebagai bukti konkret, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengesahkan Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka pada Juli 1999 yang ditandatangani oleh Republik Demokratik Kongo dan diikuti oleh kelima aktor negara Afrika lainnya, yakni Angola, Namibia, Rwanda, Uganda, dan Zimbabwe dengan menggunakan resolusi *the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC) sebagai instrumen untuk mempertahankan perdamaian.⁷ Kemudian, Dewan Keamanan menggantikan nama MONUC menjadi *the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) pada tahun 2010.⁸

Resolusi yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa (DK PBB) masih belum efektif sepenuhnya dalam membendung konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo sehingga RD Kongo masih mengalami krisis hingga kini, termasuk krisis kemanusiaan. Krisis keamanan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya kelompok pemberontak dalam negeri di Republik Demokratik Kongo.

⁶Gedifew Sewenet Yigzaw. (2019). Challenges Of Democratization In The Democratic Republic Of Congo (DRC). *Jurnal Studi Pemerintahan*. 10(2). Hal.85

⁷<https://monusco.unmissions.org/en/background>. diakses pada 19 November 2023

⁸Ibid

Republik Demokratik Kongo memiliki potensi tinggi dalam pertumbuhan ekonomi apabila dilihat dari kekayaan alam yang dimiliki. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Republik Demokratik Kongo berupa tembaga, emas, cobalt, berlian serta potensi cadangan minyak dan gas yang melimpah. Lemahnya kekuasaan hukum dan pemerintah menyebabkan manajemen lemah dan tingginya angka korupsi menjadi salah satu faktor terjadinya konflik internal di Republik Demokratik Kongo sebab memberikan celah bagi beberapa kelompok untuk dengan mudah mengambil dan memperdagangkan kekayaan alam tersebut secara ilegal.⁹

Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok - kelompok pemberontak di wilayah Kongo Timur memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan mencari tempat pengungsian yang lebih aman. Tidak sedikit pula korban konflik Republik Demokratik Kongo yang pergi mengungsi ke negara - negara tetangga terdekat, seperti ke Rwanda, Uganda dan tidak menutup kemungkinan bagi pengungsi untuk berpergian ke negara lain baik di dalam benua Afrika hingga luar benua Afrika. Menurut data *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tahun 2019, Uganda merupakan negara penampung pengungsi terbesar di Benua Afrika. Uganda menampung sekitar 1,4 juta pengungsi yang sebagian besar berasal dari Sudan Selatan sebanyak 861.000 dan dari Republik Demokratik Kongo sebanyak 397.000 pengungsi.¹⁰ Lalu kemudian pada tahun 2020, data UNHCR atas pengungsi dan pencari suaka di Uganda bertambah dibanding dengan tahun sebelumnya. Pengungsi dari Sudan Selatan menjadi sebanyak 889.054 orang dan 421.563 orang berasal dari Republik Demokratik Kongo serta pengungsi dari negara Afrika lainnya yang membuat populasi di Uganda meningkat sebanyak 4%.¹¹ Sejak tahun 2018 hingga 2021, pengungsi Kongo yang berdatangan ke Uganda terus meningkat secara signifikan. Hal ini memberikan tantangan besar bagi pemerintah Uganda untuk memenuhi tanggung jawab dan peranannya sebagai aktor negara.

⁹Yigzaw, Gedifew S, loc.cit

¹⁰<https://reporting.unhcr.org/situation-reports-2018-2021?sitcode=136&year=2019>. diakses pada 19 November 2023

¹¹<https://reporting.unhcr.org/situation-reports-2018-2021?sitcode=136&year=2019.%20diakses%20pada%2019%20November%202023>. diakses pada 20 November 2023

Negara memiliki fungsi untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sangat disayangkan bahwa pemerintah negara Republik Demokratik Kongo belum bisa memenuhi fungsi tersebut. Di sisi lain, pergerakan perpindahan oleh penduduk dalam rangka mencari keamanan, memberikan dampak langsung terhadap negara lain. Salah satunya adalah Uganda yang merupakan negara tetangga bagian Timur dari Republik Demokratik Kongo.

Uganda membuka lebar batas negaranya untuk menerima pengungsi asing yang berdatangan dan secara terbuka menerima kedatangan tersebut. Dalam hal ini memberikan pengungsi akses yang mudah untuk mendapatkan kehidupan lebih layak. Di saat yang bersamaan, Uganda merupakan salah satu negara benua Afrika tergolong negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk cenderung tinggi. Hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah Uganda untuk lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan nasional serta kebutuhan para pengungsi. Sejak tahun 2020 hingga 2021, situasi pengungsi di Uganda semakin diperburuk dan turut merasa kesulitan dikarenakan akibat dari pandemi global Covid-19 membuat dibutuhkanannya peranan bantuan dari aktor lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peranan organisasi internasional dalam membantu Uganda terkait permasalahan pengungsi, khususnya pengungsi Kongo. Organisasi internasional yang digunakan adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Terkait pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, teori Organisasi Internasional dan konsep *Human Security* merupakan landasan teori yang signifikan untuk dapat membantu peneliti dalam menganalisis pokok masalah penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Ketidakstabilan politik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo melemahkan kedaulatan pemerintah sehingga masyarakat ditelantarkan dan harus menanggung akibat dari konflik tersebut. Meskipun perang telah berhenti sejak 2003, krisis masih dapat dirasakan hingga kini dan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baru lainnya sehingga konflik internal masih sering terjadi setelahnya, khususnya di wilayah Kongo Timur. Uganda sebagai negara tetangga yang terletak di sebelah Timur Kongo, menjadi negara paling diminati oleh para pencari suaka

dan para pengungsi. Tahun 2021 merupakan tahun ketika dunia harus berhadapan dengan virus COVID-19 dan mengalami krisis yang cukup besar termasuk kesejahteraan pengungsi di pemukiman Uganda. Meskipun begitu, Uganda masih mengusahakan untuk memenuhi persediaan perlindungan dan bantuan multi-sektoral terhadap pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat diidentifikasi sedikitnya 4 masalah penelitian terkait upaya UNHCR dalam menangani pengungsi RD Kongo di Uganda tahun 2021. Diantaranya adalah, (1) Krisis Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (2) Ketidakstabilan politik yang melemahkan kekuatan hukum (3) Masih tingginya angka pengungsi RD Kongo di Uganda pada tahun 2021 (4) Krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi global COVID-19 yang turut dirasakan oleh Uganda.

Dari ke-4 permasalahan yang telah diidentifikasi, selanjutnya akan dipilih masalah penelitian yang akan dijadikan sebagai masalah pokok dari penelitian ini dalam menganalisis pembahasan. Penelitian ini memfokuskan pada upaya apa yang dilakukan oleh UNHCR untuk memenuhi peranannya sebagai organisasi internasional yang berdedikasi dalam melindungi hak-hak pengungsi serta memberikan bantuan jangka panjang terhadap pengungsi Republik Demokratik Kongo di Uganda tahun 2021.

Terhitung sejak tahun 2019, angka pengungsi yang datang ke Uganda terus bertambah. Maka dari itu, peranan *the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sangat dibutuhkan untuk dapat mengembalikan hak-hak asasi milik para pengungsi yang telah terenggut. Atas dasar tersebut, maka dapat dirumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1.2.1 Pertanyaan Pokok Penelitian

Bagaimana peranan UNHCR dalam menangani dan mengupayakan pengungsi Republik Demokratik Kongo di Uganda tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta menguraikan secara deskriptif bagaimana kontribusi *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atas pengungsi Republik Demokratik

Kongo di Uganda pada era global pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar bagi dunia, khususnya pada tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan penelitian yang dapat dibagi menjadi dua kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau masukan bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional dan juga menambah kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan *International Government Organizations* (IGO) dalam penanganan masalah pengungsi internasional, khususnya kontribusi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap masyarakat Republik Demokratik Kongo yang pergi mengungsi ke Uganda pada pandemi global COVID-19 Tahun 2021.

2) Kegunaan Akademis

Secara Akademik, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan referensi kepustakaan bagi penelitian yang akan datang. Khususnya untuk penelitian mengenai isu-isu pengungsi internasional dan kontribusi *International Government Organizations* (IGO) terkait isu pengungsi internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai penjelasan atas permasalahan yang menjadi topik pada penelitian ini, maka diperlukannya penguraian dalam bentuk sistematik penulisan penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari 3 bab yang mengandung sub bab di dalamnya sebagai penjabaran. Gambaran umum mengenai keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab pendahuluan seperti latar belakang masalah, dimana penulis memberikan gambaran singkat terkait topik yang digunakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah, yang memberikan penjelasan mengenai rumusan, batasan, identifikasi, hingga

pertanyaan pokok masalah penelitian. Sub bab selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab kajian pustaka untuk memaparkan studi kepustakaan terhadap peneliti terdahulu relevan yang dilakukan oleh penulis sebagai bahan rujukan penelitian yang dilakukan untuk mendukung penelitian. Selain itu, dalam bab ini penulis menguraikan teori dan konsep terkait topik penelitian yang digunakan sebagai rujukan perspektif. Terdapat pula kerangka pemikiran sebagai gambaran dasar dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri beberapa sub bab metode penelitian untuk memaparkan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan untuk meneliti topik yang digunakan. Selanjutnya, terdapat pula sub bab aspek, dimensi, parameter untuk memberi gambaran secara singkat mengenai aspek dan dimensi apa yang digunakan sebagai standar keberhasilan atas variabel terikat.

BAB IV: GAMBARAN UMUM UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DAN SITUASI PENGUNGSI KONGO DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO DAN UGANDA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab menjelaskan secara umum gambaran tentang UNHCR dan instrumen yang digunakan dalam mengupayakan permasalahan pengungsi yakni *Global Compact on Refugees* (GCR) dan *Comprehensive Refugee Response Framework* (CRRF). Sebelum memasuki pembahasan dan analisis, penulis turut menjelaskan secara ringkas tentang situasi konflik dan warga sipil RDK pada tahun 2018 dan 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan situasi pengungsi RDK di Uganda pada tahun 2018 dan 2021 karena pada tahun 2018 merupakan tahun dimana angka populasi

pengungsi RDK mengalami peningkatan yang signifikan dan terus meningkat hingga 2021.

BAB V : ANALISIS KETERLIBATAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MENANGANI PENGUNSI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO DI UGANDA TAHUN 2021

Dalam bab ini terdiri beberapa sub bab dimana penulis melakukan analisis dengan menyertakan pembahasan dan juga data mengenai upaya dan keterlibatan UNHCR terhadap permasalahan pengungsi RDK di Uganda pada tahun 2021. Sementara membahas bagaimana pemerintah Uganda dalam mengimplementasikan CRRF beserta tantangan – tantangan dalam pengimplementasian juga tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Uganda ketika menerima kedatangan pengungsi RDK.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari sub bab Kesimpulan, dimana penulis akan menjelaskan simpulan dari keseluruhan dalam menjawab pokok masalah dalam penelitian ini sebagai bab terakhir sekaligus penutup dalam penelitian ini.

